

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan mengkaji mengenai hadirnya narasi besar dalam kerangka liberalisasi perdagangan *World Trade Organization* (WTO) sebagai teks universal yang perlu dilaksanakan dan berlaku di semua negara anggota. Dekonstruksi dilakukan untuk dapat melihat apa tujuan lain dari perkembangan industri tekstil di Bangladesh yang dibungkus oleh narasi universal dalam kerangka liberalisasi perdagangan WTO terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan liberalisasi perdagangan WTO periode 2015-2020 berdampak terhadap kondisi pekerja industri tekstil Bangladesh, terutama dalam hal kesenjangan upah yang terjadi. Penelitian ini akan menggunakan kerangka berpikir dari kacamata *Global Value Chain* (GVC), Teori *Dependency and Underdevelopment* dan *Race to the Bottom Theory*. Penelitian ini akan menggunakan kerangka berpikir dari kacamata *Global Value Chain* (GVC), Teori *Dependency and Underdevelopment*, dan *Race to the Bottom Theory* untuk menganalisis secara komprehensif dampak liberalisasi perdagangan WTO terhadap kondisi pekerja industri tekstil Bangladesh. Perspektif GVC digunakan untuk memetakan posisi dan peran Bangladesh dalam rantai nilai produksi tekstil global serta bagaimana struktur GVC mempengaruhi distribusi nilai tambah di sektor ini. Teori *Dependency and Underdevelopment* akan mengungkap bagaimana

liberalisasi perdagangan justru memperkuat ketergantungan struktural Bangladesh terhadap negara-negara maju dan menciptakan pola pembangunan yang tidak merata, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. Sementara itu, *Race to the Bottom Theory* akan menjelaskan dinamika kompetisi global yang mendorong penurunan standar ketenagakerjaan dan upah sebagai strategi untuk mempertahankan daya saing ekspor. Integrasi ketiga kerangka teoritis ini memungkinkan penelitian untuk membongkar asumsi-asumsi dominan tentang manfaat liberalisasi perdagangan dan mengungkap realitas kompleks di balik narasi pembangunan ekonomi, khususnya kesenjangan antara pencapaian makroekonomi dengan kondisi riil pekerja di sektor hulu produksi.

Industri tekstil dan RMG (*Ready-Made Garment*) di Bangladesh merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional, yang berkontribusi cukup signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), pendapatan ekspor, maupun penciptaan lapangan kerja, terutama bagi kaum perempuan (World Bank 2018a, 15). Kinerja dari industri ini sangat dipengaruhi oleh liberalisasi perdagangan global, khususnya dalam kerangka WTO (*World Trade Organization*). Sejak putaran Uruguay dan penghapusan sistem kuota MFA (*Multi-Fibre Arrangement*) tahun 2005, Bangladesh harus bersaing di pasar global yang semakin terbuka (Mahmud 2016, 45).

Liberalisasi perdagangan yang dipromosikan oleh WTO, berlandaskan pada prinsip keunggulan komparatif, yang seharusnya mendorong spesialisasi dan efisiensi (Krugman et al. 2018, 89). Bagi Bangladesh yang menikmati tarif preferensial di banyak pasar maju, liberalisasi ini telah memacu pertumbuhan ekspor

tekstil maupun garmen yang eksploif. Periode di tahun 2015-2020 menjadi krusial karena dalam industri ini, menghadapi tantangan yang ganda yakni peningkatan persaingan di pasar global dan tuntutan untuk perbaikan standar kerja pasca-tragedi Rana Plaza (ILO 2021, 5). Bangladesh secara resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) pada 1 Januari 1995 sebagai salah satu negara anggota pendiri. Keanggotaan ini menandai dimulainya era liberalisasi perdagangan yang komprehensif bagi Bangladesh, termasuk komitmen untuk mengurangi hambatan tarif, menghapus kuota impor, dan membuka pasar domestik bagi kompetisi internasional. Dalam konteks WTO, Bangladesh sebagai negara *Least Developed Country* (LDC) mendapatkan perlakuan khusus melalui skema preferensi perdagangan, namun sekaligus harus menyesuaikan kebijakan ekonomi domestiknya dengan rezim perdagangan bebas global.

Liberalisasi perdagangan WTO memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap industri tekstil dan garmen Bangladesh, terutama pasca penghapusan sistem *Multi-Fibre Arrangement* (MFA) pada 1 Januari 2005 (Mlachila dan Yongzhen 2004; *World Bank* 2005). Penghapusan kuota ini secara fundamental mengubah lanskap perdagangan global, yang sebelumnya melindungi pasar ekspor garmen Bangladesh ke AS dan Eropa, memaksa industri untuk beradaptasi dengan persaingan global yang lebih ketat, terutama dari Tiongkok, sambil tetap mempertahankan peran vitalnya sebagai sumber lapangan kerja dan devisa negara (Anwar & Shamsuddin 2011). MFA yang telah berlaku sejak 1974 membatasi ekspor tekstil dan pakaian jadi dari negara berkembang ke negara maju melalui sistem kuota (Mlachila dan Yang 2004, 1). Penghapusan MFA melalui *Agreement*

on Textiles and Clothing (ATC) WTO menciptakan rezim perdagangan tekstil yang sepenuhnya terliberalisasi, di mana kompetisi global tidak lagi dibatasi oleh kuota melainkan semata-mata berdasarkan daya saing harga dan efisiensi produksi.

Bangladesh memanfaatkan momentum liberalisasi ini untuk mempercepat pertumbuhan industri tekstilnya. Data resmi dari *Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association* (BGMEA) menunjukkan bahwa nilai ekspor garmen (*ready-made garments*/RMG) Bangladesh mengalami peningkatan signifikan dalam jangka panjang. Pada tahun 2005, nilai ekspor garmen tercatat sekitar US\$ 6,9 miliar, kemudian meningkat pesat menjadi sekitar US\$ 26,6 miliar pada tahun 2015. Meskipun mengalami perlambatan akibat dampak pandemi global, ekspor garmen Bangladesh pada tahun 2020 tetap mencapai sekitar US\$ 27,47 miliar, menegaskan peran strategis sektor garmen sebagai tulang punggung perekonomian dan perdagangan internasional Bangladesh (BGMEA). Pertumbuhan sektor garmen menjadikan Bangladesh sebagai salah satu eksportir *Ready-Made Garments* (RMG) terbesar di dunia, dengan pangsa pasar global sekitar 6-7 persen pada periode 2019–2021. Industri RMG merupakan sektor dominan dalam perekonomian ekspor Bangladesh dengan kontribusi lebih dari 80 persen terhadap total ekspor nasional. Selain itu, sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja utama dengan sekitar empat juta pekerja, di mana sebagian besar di antaranya merupakan perempuan, yang mencerminkan peran penting industri garmen dalam struktur sosial-ekonomi Bangladesh (WTO; BGMEA; laporan industri). Liberalisasi industri tekstil di Bangladesh juga ditandai dengan kebijakan-kebijakan domestik yang pro-investasi asing dan deregulasi. Pemerintah

Bangladesh mendirikan *Export Processing Zones* (EPZ) dan kemudian *Economic Zones* untuk menarik investor asing, memberikan insentif pajak, dan memfasilitasi kemudahan berbisnis. Selain itu, Bangladesh memanfaatkan skema *Generalized System of Preferences* (GSP) dari Uni Eropa dan skema *duty-free quota-free* dari berbagai negara maju yang memberikan akses pasar preferensial.

Liberalisasi perdagangan yang masif ini juga menciptakan tekanan kompetitif yang luar biasa terhadap struktur biaya produksi. Untuk mempertahankan daya saing di pasar global yang sangat kompetitif, industri tekstil Bangladesh mengadopsi strategi *low-cost production* yang berfokus pada efisiensi biaya, terutama biaya tenaga kerja. Upah minimum pekerja garmen Bangladesh tercatat sebagai salah satu yang terendah di dunia. Data menunjukkan bahwa tingkat upah minimum pekerja garmen di Bangladesh masih relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak. Pada awal dekade 2010-an, upah minimum pekerja garmen di Bangladesh berada pada kisaran 5.300 Taka per bulan setelah revisi upah tahun 2013. Upah minimum tersebut kemudian meningkat menjadi 8.000 Taka per bulan melalui kebijakan penyesuaian upah yang mulai berlaku pada tahun 2018 (*International Labour Organization*, 2019; *Clean Clothes Campaign*, 2018). Meskipun mengalami peningkatan, berbagai studi dan organisasi advokasi ketenagakerjaan, termasuk *Asia Floor Wage Alliance*, menilai bahwa upah minimum tersebut masih berada jauh di bawah standar *living wage*, yang menurut berbagai perkiraan memerlukan pendapatan bulanan yang jauh lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya (*Fair Labor Association*; *Asia Floor Wage Alliance*). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai

distribusi keuntungan dari liberalisasi perdagangan dan siapa yang sesungguhnya diuntungkan dalam rantai nilai produksi tekstil global.

Pertumbuhan eksponensial industri tekstil dan garmen Bangladesh dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan paradoks pembangunan ekonomi yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Di satu sisi, liberalisasi perdagangan melalui kerangka WTO telah berhasil mentransformasi Bangladesh menjadi raksasa ekspor garmen global dengan pencapaian nilai ekspor yang terus meningkat. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang impresif ini tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan yang signifikan bagi jutaan pekerja yang menjadi tulang punggung industri tersebut.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kesenjangan upah yang masih sangat lebar antara upah yang diterima pekerja tekstil Bangladesh dengan standar upah layak (*living wage*). Meskipun upah minimum pekerja garmen di Bangladesh telah mengalami peningkatan secara nominal dari 5.300 Taka pada tahun 2013 menjadi 8.000 Taka sejak 2018, angka tersebut masih jauh dari standar kebutuhan hidup layak. Penelitian *Bangladesh Institute of Labour Studies* memperkirakan bahwa upah layak pekerja garmen pada tahun 2020 seharusnya berada di kisaran 33.368 Taka per bulan, sementara *Asia Floor Wage Alliance* menetapkan standar yang lebih tinggi, yakni sekitar 51.000 Taka per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.

Data empiris menunjukkan dampak konkrit dari kesenjangan upah ini terhadap kehidupan pekerja. Survei yang dilakukan oleh *Clean Clothes Campaign* dan mitranya (seperti *Oxfam*) menemukan bahwa 9 dari 10 pekerja garmen di

Bangladesh tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dasar keluarga mereka dengan upah yang diterima (*Oxfam* 2019; *Clean Clothes Campaign* 2019, 10). Lebih lanjut, penelitian oleh *Penn State Center for Global Workers' Rights* dan organisasi buruh lainnya secara konsisten mengungkapkan bahwa pekerja garmen Bangladesh harus bekerja rata-rata 12-14 jam per hari, termasuk lembur wajib, karena upah pokok yang rendah membuat mereka tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (Anner 2019; Swedwatch 2024). Kondisi ini memaksa banyak pekerja, terutama perempuan, untuk meninggalkan anak-anak mereka di kampung halaman atau menitipkan kepada kerabat karena tidak mampu membiayai penitipan anak di kota.

Masalah kesenjangan upah semakin diperparah oleh stagnasi upah riil yang terjadi selama periode 2015-2020. Meskipun nilai ekspor garmen Bangladesh meningkat dari USD 25,49 miliar pada tahun 2015 menjadi sekitar USD 33,07 miliar pada tahun 2019, upah minimum nominal pekerja garmen tidak mengalami penyesuaian sejak penetapan terakhir pada akhir tahun 2013 sebesar 5.300 Taka hingga pengumuman revisi upah baru pada akhir tahun 2018 sebesar 8.000 Taka, yang mengakibatkan penurunan daya beli pekerja akibat tekanan inflasi selama periode tersebut (BGMEA; *Clean Clothes Campaign* 2018; IndustriALL 2018).

Penelitian dan laporan advokasi pada periode 2018-2019 menegaskan bahwa upah minimum pekerja garmen Bangladesh yang baru ditetapkan tidak cukup mengimbangi tekanan biaya hidup dan kurs. Meskipun upah nominal dinaikkan dari 5.300 Taka pada 2013 menjadi 8.000 Taka pada 2018, studi menunjukkan bahwa penyesuaian tersebut masih kurang untuk mengikuti kenaikan

biaya hidup, dan pekerja melakukan protes atas rendahnya kenaikan upah tersebut. Analisis oleh *Worker Rights Consortium* mengungkap bahwa biaya tenaga kerja dalam nilai USD riil bagi merek global telah menurun sekitar 38 % sejak 2019, akibat stagnasi upah, depresiasi nilai Taka terhadap dolar AS, dan inflasi dolar AS, yang memperburuk daya beli pekerja dalam konteks global (*Worker Rights Consortium 2023; Clean Clothes Campaign 2018; Business & Human Rights Resource Centre 2018*).

Dimensi gender menambah kompleksitas permasalahan kesenjangan upah di industri tekstil Bangladesh. Sekitar 80% dari 4,2 juta pekerja garmen di Bangladesh adalah perempuan (ILO 2020; YPSA 2021), namun mereka menghadapi diskriminasi struktural dalam sistem pengupahan. Bukti diskriminasi ini mencakup upah perempuan yang 22% hingga 30% lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan konsentrasi mereka di posisi tingkat rendah dengan prospek promosi yang buruk, meskipun merupakan mayoritas tenaga kerja (*Daily Industry 2025*). Pekerja perempuan di industri garmen Bangladesh menerima upah 20-25% lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang setara, sebagai akibat dari segregasi pekerjaan dan minimnya promosi bagi perempuan (*Anker Research Institute* dikutip dalam *Asia Garment Hub 2024; FSG 2022, 1; Plan International 2019*). Kesenjangan ini semakin melebar pada posisi-posisi supervisor dan manajerial, di mana representasi perempuan hanya sekitar 5-8% meskipun mereka mendominasi di level operator (*Plan International 2019, 6; FSG 2022, 1; World Bank 2023*).

Penelitian yang dilakukan oleh *Better Work Bangladesh*, program kolaborasi antara ILO dan *International Finance Corporation* (IFC), mengidentifikasi bahwa pekerja perempuan juga menghadapi berbagai bentuk diskriminasi non-upah. Survei terhadap 500 pabrik garmen pada tahun 2019 menemukan bahwa 65% pabrik tidak memberikan cuti menstruasi yang memadai, 72% tidak menyediakan fasilitas penitipan anak, dan 58% tidak memberikan jaminan perlindungan kehamilan sesuai standar ILO (FLA dan *Awaj Foundation* 2019; *Plan International* 2019; Nari 2021). Kondisi ini memaksa banyak pekerja perempuan untuk menyembunyikan kehamilan mereka atau kehilangan pekerjaan ketika hamil.

Rendahnya upah dasar mendorong sistem lembur yang eksploitatif sebagai mekanisme kompensasi. Data *Bangladesh Labour Act* menunjukkan bahwa batas maksimal lembur legal adalah 2 jam per hari atau 12 jam per minggu (maksimum 60 jam kerja total per minggu), namun realitas di lapangan sangat berbeda (*Bangladesh Labour Act* 2006). Investigasi yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* pada tahun 2017 menemukan bahwa 78% pekerja garmen di Bangladesh bekerja lembur melebihi batas legal, dengan rata-rata 60-80 jam lembur per bulan. Lebih mengkhawatirkan, 42% responden melaporkan bahwa lembur bersifat wajib dan penolakan dapat berakibat pada pemecatan atau penalti (*Human Rights Watch* 2015/2017).

Kondisi kerja di pabrik garmen juga menjadi perhatian serius. Meskipun telah terjadi perbaikan signifikan pasca tragedi Rana Plaza tahun 2013, berbagai laporan menunjukkan masih banyak pabrik yang tidak memenuhi standar

keselamatan dan kesehatan kerja. *Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh*, yang melakukan inspeksi terhadap sekitar 1.600 hingga 1.700 pabrik pada periode 2013-2020, menemukan bahwa pada tahun 2019, masih terdapat 38% pabrik yang memiliki masalah struktural serius yang belum diperbaiki, 52% memiliki sistem proteksi kebakaran yang tidak memadai, dan 47% tidak memiliki sistem evakuasi darurat yang sesuai standar (*Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, Quarterly Aggregate Reports 2019; Fair Wear Foundation 2019*).

Permasalahan fundamental yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah kesenjangan antara retorika liberalisasi perdagangan sebagai motor pertumbuhan inklusif dengan realitas yang dialami oleh pekerja di lapangan. Narasi dominan yang dipromosikan oleh institusi internasional seperti WTO, *World Bank*, dan pemerintah Bangladesh menekankan bahwa liberalisasi perdagangan akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Data agregat makro ekonomi seolah-olah mendukung narasi ini adalah GDP per kapita Bangladesh meningkat dari sekitar USD 1.212 pada 2015 menjadi sekitar USD 1.856 pada 2020 (*World Bank Open Data*, nd). Selain itu, tingkat kemiskinan turun dari 24,3% (data 2016 menggunakan garis kemiskinan nasional) menjadi perkiraan 20,5% pada 2020 (sebelum dampak penuh pandemi COVID-19) (*World Bank Poverty and Equity Briefs*, nd). Faktor kunci di balik tren ini adalah jutaan lapangan kerja yang tercipta di sektor garmen, yang secara konsisten mempekerjakan lebih dari 4 juta pekerja (BGMEA dan Laporan Industri, nd).

Urgensi untuk mengkaji kesenjangan upah pekerja industri tekstil Bangladesh dalam konteks liberalisasi perdagangan WTO semakin mendesak mengingat beberapa perkembangan kritis yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bangladesh dijadwalkan untuk lulus dari status *Least Developed Country* (LDC) pada tahun 2026, yang berarti negara ini akan kehilangan akses preferensial ke pasar Uni Eropa melalui skema *Everything But Arms* (EBA) dan akses serupa ke pasar negara-negara maju lainnya. Kehilangan preferensi perdagangan ini diperkirakan akan meningkatkan tarif ekspor garmen Bangladesh ke Uni Eropa dari 0% menjadi rata-rata 12%, yang dapat mengurangi daya saing ekspor secara signifikan. Dalam situasi ini, terdapat risiko besar bahwa tekanan untuk mempertahankan kompetitivitas akan semakin mendorong penurunan upah real atau penolakan kenaikan upah, yang akan memperburuk kondisi pekerja yang sudah rentan.

Pentingnya mengangkat masalah kesenjangan upah pekerja industri tekstil Bangladesh dalam kerangka liberalisasi perdagangan WTO juga terletak pada kebutuhan untuk mendekonstruksi narasi dominan tentang manfaat universal dari perdagangan bebas dan mengungkapkan kompleksitas serta kontradiksi yang tersembunyi di baliknya. Penelitian ini penting secara akademis karena memberikan kontribusi terhadap literatur Ekonomi Politik Global untuk menganalisis distribusi nilai dan kekuasaan dalam rantai produksi tekstil global, serta mengungkap bagaimana struktur GVC menciptakan dan melanggengkan ketimpangan antara negara maju dan berkembang, serta antara pemodal dan pekerja. Secara praktis, penelitian ini penting untuk memberikan basis empiris bagi

advokasi kebijakan yang lebih progresif, baik di level nasional melalui reformasi sistem pengupahan dan penguatan perlindungan pekerja di Bangladesh, di level internasional melalui reformasi aturan perdagangan WTO untuk memasukkan standar perburuhan yang mengikat, maupun di level korporasi dengan mendorong praktik pembelian yang berkelanjutan oleh merek-merek global. Lebih fundamental lagi, penelitian ini penting untuk memberikan suara kepada jutaan pekerja garmen mayoritas perempuan dari latar belakang miskin yang selama ini tidak terdengar dalam wacana besar tentang globalisasi dan pembangunan ekonomi, memastikan bahwa pembahasan tentang liberalisasi perdagangan tidak hanya fokus pada pertumbuhan agregat dan efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan distributif, martabat manusia, dan keberlanjutan sosial-ekonomi jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, liberalisasi perdagangan WTO tidak diposisikan sebagai satu-satunya penyebab langsung kesenjangan upah, melainkan sebagai faktor struktural yang berkontribusi signifikan dengan menciptakan konteks kompetisi global yang menekan standar ketenagakerjaan. Kesenjangan upah dipahami sebagai hasil dari interaksi antara tekanan eksternal liberalisasi WTO, pilihan kebijakan domestik Bangladesh, dan dinamika kekuasaan dalam rantai nilai global. Dari rumusan masalah ini, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yakni **“Bagaimana dampak liberalisasi perdagangan dalam kerangka WTO terhadap kesenjangan upah pekerja di sektor industri tekstil Bangladesh periode 2015-2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan holistik dampak liberalisasi perdagangan dalam kerangka WTO terhadap kesenjangan upah pekerja di sektor industri tekstil periode 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Dampak Liberalisasi Perdagangan WTO terhadap Industri Tekstil Bangladesh 2015 - 2020: Studi Kasus Kesenjangan Upah Pekerja. Industri Tekstil 2015-2020 ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hubungan internasional di bidang ekonomi politik global secara khusus pembangunan ekonomi. Penelitian ini memberikan studi kasus empiris dari Bangladesh sebagai negara kunci dalam rantai pasok global. Kontribusi utama penelitian ini adalah mendekonstruksi asumsi-asumsi teori perdagangan liberal dengan menguji secara empiris apakah manfaat liberalisasi perdagangan WTO benar-benar terdistribusi secara merata atau justru menciptakan paradoks pertumbuhan tanpa kesejahteraan. Melalui pendekatan *Global Value Chain*, penelitian ini menganalisis secara simultan dinamika pada level makro ekonomi (pertumbuhan ekspor tekstil dan kontribusinya terhadap PDB Bangladesh) dan level mikro ekonomi (kesenjangan upah dan distribusi nilai tambah kepada pekerja), sehingga dapat mengungkap mekanisme struktural yang menyebabkan ketimpangan dalam rantai produksi

global. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang kredibel bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji relasi kompleks antara liberalisasi perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan distributif di negara-negara berkembang, serta memberikan perspektif kritis terhadap narasi dominan tentang manfaat universal perdagangan bebas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah Bangladesh, bagi pelaku industri tekstil, bagi pekerja tekstil maupun bagi mahasiswa. Penelitian ini memberikan manfaat praktis kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri tekstil Bangladesh. Temuan penelitian ini dapat menjadi basis empiris untuk merumuskan kebijakan upah minimum yang lebih adil, merancang regulasi ketenagakerjaan yang lebih protektif, serta menyusun strategi perdagangan pasca-graduasi LDC yang berorientasi pada distribusi keuntungan merata dan penguatan posisi tawar dalam negosiasi perdagangan internasional untuk memasukkan klausul standar perburuhan yang mengikat. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika rantai nilai global dan posisi Bangladesh dalam struktur tersebut, sehingga dapat membantu merumuskan strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan, mendorong dialog konstruktif dengan pembeli internasional untuk mencapai kesepakatan harga yang lebih adil, serta mengadopsi praktik *corporate social responsibility* yang substantif di tengah meningkatnya kesadaran konsumen global tentang keadilan sosial. Penelitian ini dapat menjadi model metodologi kualitatif dalam mengkaji dampak kebijakan ekonomi internasional terhadap kondisi sosial-

ekonomi pekerja, menunjukkan bagaimana teori liberalisasi perdagangan dan *Global Value Chain* dapat dioperasionalisasikan dalam studi kasus konkret, serta memberikan inspirasi untuk mengadopsi pendekatan kritis dalam mengkaji fenomena ekonomi dan menjadi referensi bagi penelitian serupa di negara berkembang lain atau sektor industri berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai peta jalan dari penelitian. Bagian ini dimulai dari latar belakang masalah yang menjelaskan tentang urgensi dan konteks industri tekstil Bangladesh di tengah liberalisasi WTO, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (akademis dan praktis) serta sistematika penulisan mengenai dampak liberalisasi perdagangan dalam kerangka WTO terhadap kesenjangan upah pekerja di sektor industri tekstil periode 2015-2020.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan fondasi teoritis penelitian. Pembahasan dimulai dengan tinjauan pustaka terkait dampak liberalisasi perdagangan dalam kerangka WTO terhadap kesenjangan upah pekerja di sektor industri tekstil periode 2015-2020, kerangka teoritis yang mencakup konsep *Global Value Chain* (GVC), teori *Dependency and*

Underdevelopment, dan teori *Race to the Bottom*, operasionalisasi teori, hipotesis dan metode penelitian dalam menjelaskan dampak liberalisasi perdagangan dalam kerangka WTO terhadap kesenjangan upah pekerja di sektor industri tekstil periode 2015-2020.

BAB III LIBERALISASI PERDAGANGAN WTO TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL BANGLADESH

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai konteks liberalisasi perdagangan WTO dan perkembangannya, profil industri tekstil Bangladesh sebagai sektor strategis ekonomi nasional, serta kondisi ketenagakerjaan dan struktur pengupahan di industri tekstil Bangladesh periode 2015-2020. Bab ini juga menguraikan dinamika *Global Value Chain* dalam industri tekstil global dan posisi Bangladesh dalam struktur *buyer-driven value chain*.

BAB IV DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN WTO TERHADAP KESENJANGAN UPAH PEKERJA INDUSTRI TEKSTIL BANGLADESH

Bab ini merupakan inti dari analisis skripsi. Setelah menyajikan gambaran umum dari industri, pembahasan akan dibagi menjadi dua fokus utama sesuai rumusan masalah: analisis dampak liberalisasi perdagangan WTO terhadap pertumbuhan ekonomi makro industri tekstil Bangladesh (menguji korelasi dengan ekspor dan PDB) dan analisis dampak terhadap dinamika kesenjangan upah pekerja (menguji kesenjangan antara upah minimum, upah riil, dan *living wage* serta dimensi gender). Bagian akhir dan yang terpenting adalah pembahasan komprehensif yang mengintegrasikan temuan makro dan mikro untuk secara holistik menjawab pertanyaan utama tentang sifat pertumbuhan (inklusif atau tidak inklusif) yang dihasilkan oleh liberalisasi WTO terhadap kesenjangan upah pekerja WTO terhadap kesenjangan upah pekerja industri tekstil Bangladesh

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian. Dimulai dengan kesimpulan yaitu ringkasan jawaban atas hasil penelitian mengenai dampak liberalisasi perdagangan WTO terhadap kesenjangan upah pekerja industri tekstil Bangladesh periode 2015-2020. Selanjutnya, disajikan saran yang ditujukan kepada pemerintah Bangladesh, pelaku industri

tekstil, organisasi internasional seperti WTO dan ILO, serta akademisi tentang rekomendasi kebijakan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang lebih inklusif dan memperhatikan kesejahteraan pekerja di masa mendatang.

